



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng – Rangas – Mamuju 91512  
Email : [dprd.sulbar@gmail.com](mailto:dprd.sulbar@gmail.com). Telp/Fax : 0426-2325292

Nomor : B.000.4.2.1/533/X/2024  
Lamp. : -  
Hal : **Rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat.**

Mamuju, 25 Oktober 2024

Yth. Pj. Gubernur Sulawesi Barat  
di –  
M a m u j u.

Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21 Oktober 2024 yang lalu terkait dengan adanya rencana aktivitas tambang pasir oleh PT. Jaya Pasir Andalan di sepanjang sungai hingga pesisir Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru dianggap potensi merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan nelayan serta dalam proses penerbitan izinnya dinilai sangat cacat prosedural. Dan dilanjutkan dengan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama OPD Terkait Provinsi Sulawesi Barat (Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal & PTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup) pada hari Kamis, 24 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Mayoritas masyarakat Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru pemilik lahan disekitar lokasi (titik kordinat) tambang sepanjang jalur sungai menolak adanya aktivitas tambang di daerah tersebut.
2. Ditemukan adanya data fakta dilapangan terkait pencatutan nama dan tanda tangan masyarakat yang bukan pemilik lahan dibantaran sungai dalam proses pengumpulan dokumen oleh pihak perusahaan sebagai prasyarat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Potensi merusak keberadaan hutan mangrove yang ada disekitar lokasi tambang.
4. Potensi terjadinya konflik di masyarakat yang berkepanjangan apabila proses tambang dipaksakan untuk beroperasi.
5. Sumber pendapatan nelayan diperairan lokasi tambang akan hilang dan mengganggu perekonomian masyarakat nelayan.
6. Akan menimbulkan pencemaran air sungai muara sampai laut sekitar lokasi tambang.
7. Potensi adanya penggerusan tanah disepanjang sungai dan muara lokasi tambang.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka DPRD Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat melalui OPD Terkait Provinsi Sulawesi Barat (Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal & PTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup) sebagai bahan pertimbangan evaluasi agar rencana pengelolaan tambang pasir itu tidak dilanjutkan dan untuk pihak PT. Jaya Pasir Andalan agar tidak beraktivitas selama masyarakat menolak.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Wakil Ketua Sementara,



**Dr. Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si.**

Tembusan Yth.:

1. Camat Kalukku
2. Kepala Desa Kalukku Barat
3. Kepala Desa Beru-Beru
- ④ 4. Forum Masyarakat Nelayan Pesisir Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru
5. PT. Jaya Pasir Andalan